



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id
S A L A T I G A

Salatiga, 7 Februari 2025

Nomor : 100.1.3/073/LIND
Lampiran : -
Perihal : **Undangan.**

Kepada :
Yth. Pj. Wali Kota Salatiga
di -
S A L A T I G A

Dasar: Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 3 Februari 2025
tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Februari 2025.

Dalam rangka melaksanakan fungsi Pembentukan Perda DPRD Kota Salatiga, khususnya dalam pembahasan Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh, perlu dilaksanakan pembahasan materi dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berkenan Saudara Pj.Wali Kota Salatiga untuk menugaskan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda, Inspektur, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kabag. Hukum Setda, Kabag Pemerintahan Setda, Kepala Bagian Organisasi Setda, Camat Sidomukti, Lurah Mangunsari, dan Lurah Dukuh untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh, besok pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 14 Februari 2025
Jam : Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga
Acara : *Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh.*

Keterangan : materi dapat diunduh
<https://bit.ly/BahanRapatRaperdaPemekaran>

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA
KETUA,


DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Segenap Pansus (sebagai undangan);
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda;
6. Inspektur;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Kepala BKPSDM;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
10. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
11. Kabag. Hukum Setda;
12. Kabag Pemerintahan Setda;
13. Kepala Bagian Organisasi Setda;
14. Camat Sidomukti;
15. Lurah Mangunsari;
16. Lurah Dukuh; dan
17. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 [Website www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)
E-mail dprd@salatigakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jumat, 14 Februari 2025.
Waktu : Pkl. 09.00 s.d selesai WIB.
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga.
Acara : RDP Pansus Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PUDJO SUSENO, SE	KETUA	1.
2.	H. BASIRIN	WAKIL KETUA	2.
3.	SITI INAYAH, A.Md	SEKRETARIS	3.
4.	M. MIFTAH	ANGGOTA	4.
5.	ANDREAS YOSEP K	ANGGOTA	5.
6.	AGUS WARSITO	ANGGOTA	6.
7.	LAURENS ADRIAN, ST	ANGGOTA	7.

Mengetahui,
PANSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

PUDJO SUSENO, SE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

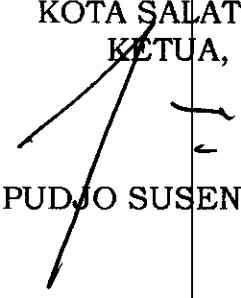
DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jumat, 14 Februari 2025.
Waktu : Pkl. 09.00 s.d selesai WIB.
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga.
Acara : RDP Pansus Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh

No	NAMA	INSTASI	TANDA TANGAN
1.	PUDJO SUSENO	DPRD	1.
2.	Joko Waluyo	Huber	2.
3.	Tara	BKPSDM	3.
4.	RUBISA	BKPSDM	4.
5.	Jana	Dukuh	5.
6.	MEI INDAH	MANGUNSARI	6.
7.	Siti Andjajant		7.
8.	SRI SUWASTY	DISDUKCAPIL	8.
9.	NEORATO	DISDUKCAPIL	9.
10.	Danang wahyuni k.	Bagian gassari	10.
11.	Angelica Dewey	DPUPR	11.
12.	Thohir	DPUPR	12.
13.	Nayal	Huber	13.
14.	Beltzyaza Felyora	Huber Huber	14.
15.	Arnta F	Huber	15.
16.	Joy M.	Huber	16.
17.	Heny S	Sehan	17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.

22				22	
23			23		
24				24	
25			25		
26				26	
27			27		
28				28	
29			29		
30				30	

Mengetahui,
PANSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,


PUDJO SUSENO, SE



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

NOTULEN

- Rapat : Rapat Pansus Raperda tentang Pemekaran
Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh
- Hari/Tanggal : Jumat, 14 Februari 2025
- Waktu Panggilan : Jam 09.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga
- Acara : Rapat Pansus Raperda tentang Pemekaran
Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh
- Pimpinan Rapat : Pudjo Suseno, SE
- Peserta Sidang/Rapat : 19 (sembilan belas) orang
- Hasil Rapat :
- A. Pembahasan :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra mengemukakan bahwa latar belakang dilaksanakannya pemekaran wilayah adalah untuk peningkatan pelayanan publik, keinginan warga, dan rekomendasi dari Kemendagri dan Gubernur. Untuk sumber daya manusia dan sarana prasarana sudah siap du tahun 2026 dan persiapan e-KTP mulai tahun 2025.
 2. Camat Sidomukti mengemukakan bahwa proses administrasi perizinan Kemendagri dan Gubernur Jawa Tengah telah dimulai tahun 2019. Kesiapan di Kota Salatiga, pemekaran wilayah sudah masuk di Musrenbang. Untuk persiapan pemekaran wilayah, maka dibutuhkan Perda terkait. Untuk perubahan anggaran 2025 minta anggaran sarana prasarana. Adapun pembangunan oleh DPU sesuai dengan DED berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Untuk anggaran tahun 2026 sudah dianggarkan. Terkait fasilitasi perubahan dokumen kependudukan akan melibatkan RT dan RW kelurahan yang baru dimana akan dilaksanakan setelah Perda ditetapkan.
 3. Kabag Tata Pemerintahan mengemukakan bahwa Kelurahan Mangunsari akan menjadi 2 kelurahan yaitu Mangunsari Lor dan Mangunsari Kidul. Untuk Kelurahan Dukuh akan menjadi 2 yaitu Dukuh Krajan dan

Dukuh Asri. Kaitannya dengan batas wilayah sudah dilakukan pengecekan. Adapun kantor kelurahan Dukuh Krajan ada di Parikesit sedangkan Dukuh Asri di kantor kelurahan lama. Dilaporkan bahwa proses di Kemendagri pending selama proses Pilkada sehingga belum selesai. Nantinya akan berlanjut ke proses permintaan kode ke Kemendagri.

4. DPUPR mengemukakan bahwa pembangunan kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh telah melalui perencanaan mulai Februari sampai dengan April. Anggaran per kelurahan kurang lebih 1,5 miliar yang mana hanya cukup untuk Gedung. Sedangkan aula, pagar dan lainnya akan dianggarkan tahun 2026.
5. Kepala BKPSDM mengemukakan bahwa pengisian pegawai menunggu kotak dari Bagian Organisasi Setda. BKPSDM telah menyusun proyeksi pemenuhan pegawai.
6. Lurah Mangunsari mengemukakan bahwa pemekaran kelurahan merupakan usulan warga. Hal ini karena padatnya warga kelurahan yang mencapai 17.300 penduduk dalam 96 RT dan 16 RW dengan kondisi beberapa RW padat penduduk. Dengan pemekaran kelurahan ini diharapkan agar lebih fokus pada sarana prasarana dan permasalahan. Mengikuti usulan masyarakat, maka pemekaran kelurahan ini tidak memecah dukuh.
7. Lurah Dukuh mengemukakan bahwa terdapat 15.000 warga dengan jumlah pegawai 8 orang sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelayanan. Sama dengan Kelurahan Mangunasri, pemekaran Kelurahan Dukuh juga tidak membelah dukuh atau kampung.
8. Dinas Perumahan dan Permukiman mengemukakan bahwa penegasan batas kelurahan telah dilakukan musyawaran dengan warga yang dilengkapi dengan berita acara.
9. Bp. Pudjo Suseno, SE mengemukakan untuk proses agar dipercepat sehingga lekas selesai.
10. Bp. Laurens Adrian, ST menanyakan antisipasi pemerintah dalam pengubahan dokumen warga.
11. Asisten Pemerintahan mengemukakan bahwa perubahan KTP ada di anggaran penetapan 2025 namun masih kurang. Perubahan dokumen warga dilaksanakan setelah pengubahan KTP.

12. Bp. Laurens Adrian, ST menegaskan perlunya kesiapan warga dalam perubahan dokumen lainnya.
13. Camat Sidomukti menyampaikan bahwa kesiapan tersebut sudah diinformasikan kepada dalam pertemuan dengan warga yang melibatkan RT dan RW. Pelaksanaan pengubahan dokumen akan dilaksanakan secara kolektif. Untuk sertifikat akan menghadirkan BPN.
14. Bp. Laurens Adrian, ST menanyakan tentang pengubahan dokumen lain seperti sertifikat, BPKP dan dokumen lainnya.
15. Camat Sidomukti mengemukakan bahwa dalam pengubahan dokumen membutuhkan proses sehingga membutuhkan koordinasi. Untuk itu akan ada koordinasi dengan Tim yang dibentuk.
16. Bp. M. Miftah mengemukakan bahwa dengan adanya pemekaran wilayah, maka rasio beban pelayanan akan lebih kecil. Untuk itu diharapkan peningkatan pelayanan ke masyarakat yang mana akan dipersiapkan oleh BKPSDM. Sehubungan dengan pemekaran kelurahan merupakan aspirasi warga, maka untuk segera di proses. Apabila dipastikan siap, maka DPRD akan support karena sudah ditunggu oleh masyarakat sehingga tidak menyisakan permasalahan. Apabila bisa diawali pada etape satu dan lanjut pada tahun 2026 untuk menjadi kelurahan rintisan. Sehubungan dengan dokumen kependudukan, maka dibutuhkan kesiapan Disdukcapil dalam perubahan dokumen kependudukan.
17. Kepala Dinas Dukcapil mengemukakan bahwa perubahan administrasi kependudukan masyarakat, Dinas Dukcapil akan melaksanakan sosialisasi kepada lembaga terkait sehingga meminimalisir permasalahan nantinya. Dalam perubahan dokumen kependudukan tentu saja tidak bisa dihindari adanya faktor-faktor subyektif yang akan menjadi permasalahan. Adapun pemekaran wilayah blangko sudah siap karena Disdukcapil telah menabung keping. Apabila langsung 10.000 blangko akan kesulitan. Hal tersebut karena dalam perjalanan pelayanan, ada pemekaran RT yang cukup banyak sehingga menggerus persediaan KTP. Terkait kapasitas mesin cetak KTP satu hari 200 keping. Selain KTP, KIA juga butuh persiapan. Sehubungan dengan hal tersebut, Disdukcapil

membutuhkan support alat dan tenaga. Berdasarkan target layanan, maka dibutuhkan penambahan jam kerja yang mana akan ada kebutuhan anggaran untuk honorarium. Pegawai di Dinas Dukcapil saat ini ada 16 PNS sisanya THL berjumlah 40. Nantinya apabila ada hambatan mohon untuk dapat dibackup secara politis.

18. Bp. Pudjo Suseno, SE menanyakan apakah KTP elektronik masih cetak fisik.

19. Kepala Dinas Dukcapil mengemukakan bahwa ada digital KTP disamping fisik. Lebih banyak yang menginginkan fisik karena tidak semua handphone support.

20. Bp. Pudjo Suseno, SE mengemukakan perlu dicermati supaya apabila ada permasalahan terkait perubahan dokumen kependudukan dengan pelayanan publik lain agar bisa diselesaikan.

21. Bp. M.Miftah mengemukakan bahwa perlu adanya Tim Advokasi untuk mengatasi permasalahan tersebut nantinya. Dengan adanya tim tersebut akan dapat mendukung perubahan administrasi kependudukan dimana masyarakat diberikan pemahaman terkait administrasi pelayanan. Tim advokasi ini nantinya akan membimbing masyarakat apabila ada permasalahan. Untuk itu, ditetapkan dahulu operasionalnya dilaksanakan kemudian. Untuk landasan hukum sudah ok.

22. Camat Sidomukti mengemukakan Tim Advokasi dari RT dan RW setempat. Hal tersebut perlu penganggaran, oleh karena itu membutuhkan dukungan setelah Perda di tetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Sidomukti telah mengirimkan nota dinas pada anggaran perubahan.

23. Bp. Pudjo Suseno, SE menegaskan untuk dibuat pendawalan program sehingga Perda dapat segera diselesaikan.

B. Kesimpulan

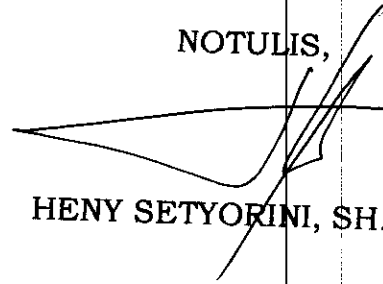
- : 1. Pemekaran Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari merupakan aspirasi dari masyarakat sekaligus rekomendasi dari Kemendagri dan Gubernur, oleh karena itu proses untuk dapat disegerakan.
2. Dibutuhkan anggaran dalam penyelesaian sarana dan prasarana kelurahan hasil pemekaran.
3. Dibutuhkan penataan pegawai dan kelembagaan di kelurahan hasil pemekaran.
4. Ketersediaan blangko e-KTP mencukupi.

5. Perlu dibentuk Tim Advokasi guna mengatasi masa transisi perubahan dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan lainnya.

C. Penutup

: Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat

NOTULIS,



HENY SETYORINI, SH., MH

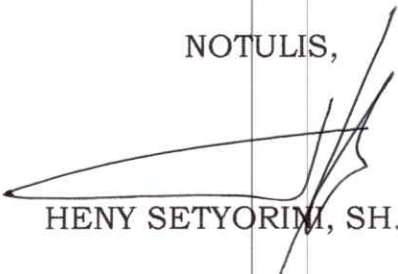
5. Perlu dibentuk Tim Advokasi guna mengatasi masa transisi perubahan dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan lainnya.

C. Penutup : Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat

D. Foto Kegiatan :



NOTULIS,


HENY SETYORIM, SH., MH